



**Rilis**  
**Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI**  
**Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 – 2025**  
**Ke Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat**  
**Tanggal 12 – 14 September 2024**

---

Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 - 2025 ke Kabupaten Bogor – Provinsi Jawa Barat pada tanggal 12 – 14 September 2024. Kunjungan dipimpin oleh Bapak Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag, Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I beserta beberapa Anggota Komisi VIII DPR RI yang mengikuti acara kunjungan spesifik.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Bogor – Provinsi Jawa Barat dalam rangka melakukan kunjungan ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Penanggulangan Bencana (PB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kedatangan tim kunker spesifik Komisi VIII DPR RI diterima oleh Sekretaris Utama (Sestama) BNPB beserta jajaran. Pada pertemuan tersebut membahas terkait pelaksanaan fungsi pengawasan kebencanaan dan peninjauan Pusdiklat PB BNPB. Urgensi kedatangan tim kunker spesifik Komisi VIII DPR RI ke Pusdiklat PB BNPB dalam rangka menyaksikan secara langsung tugas dan fungsi Pusdiklat PB BNPB dalam pelayanan publik di internal dan eksternal BNPB serta komitmen BNPB untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan mampu merespons segala bentuk bencana secara profesional, cepat, tepat dan akuntabel. Pelatihan yang dilaksanakan diharapkan dapat membekali para peserta baik di level operator, teknis/analisis, ahli dengan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai kepedulian yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi darurat bencana.

Selain itu, pada kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Pusdiklat PB BNPB Pimpinan dan Anggota menyampaikan beberapa pandangan dan masukan sebagai berikut:

1. Melibatkan kelompok dan atau masyarakat umum dalam melaksanakan pelatihan dan pendidikan kebencanaan baik pada tingkatan lokal dan nasional.
2. Mendorong partisipasi masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi kebencanaan untuk meminimalisir resiko bencana.
3. Mengalokasikan pendistribusian anggaran yang proporsional untuk program bencana non-alam.
4. Secara berkala melakukan pemantauan terhadap peralatan kebencanaan yang telah didistribusikan ke BPBD se-Indonesia.
5. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan program kebencanaan.

Pada bagian penutupan tim kunker spesifik Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi kepada BNPB dan jajaran yang telah hadir dan mendukung kegiatan ini.

Kabupaten Bogor, 12 September 2024  
Tim Kunker Spesifik Komisi VIII DPR RI.